

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan obyek wisata berbasis masyarakat di Hutan Pinus Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta

Obyek yang menjadi daya tarik wisata alam harus dijaga kelestarian dan kealamiannya dan terus digali potensinya serta meningkatkan dan menyajikan spesifikasi penampilan atraksi utama masing-masing obyek wisata, diversifikasi dan kontinuitas penyelenggaraan aktivitas khusus (Budiyanto 2010). Berdasarkan perspektif konservasi, pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi untuk perlindungan sumberdaya alam, meningkatkan kesadaran terhadap pengunjung mengenai isu keanekaragaman hayati dan konservasi serta memberikan mata pencaharian kepada masyarakat secara berkelanjutan (Borges *et al.* 2011). Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dan pengelolaan dengan melakukan penataan obyek dan daya tarik wisata, sarana rekreasi dan kawasan pariwisata sehingga pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat terselenggara. Berikut akan dibahas tentang pengelolaan obyek wisata berbasis masyarakat di Hutan Pinus Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta yaitu Potensi fisik wisata Hutan pinus Mangunan, Fasilitas Wisata Hutan Pinus Mangunan, Aksesibilitas Hutan Pinus Mangunan, Peranan masyarakat dalam mempromosikan wisata hutan pinus mangunan.

Pengelolaan obyek wisata berbasis masyarakat di Hutan Pinus Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta meliputi: Potensi fisik wisata Hutan pinus Mangunan, Fasilitas Wisata Hutan Pinus Mangunan, Akseibilitas Hutan Pinus Mangunan dan Peranan masyarakat dalam mempromosikan wisata hutan pinus mangunan. Berikut uraian analisis dan pembahasannya:

1. Potensi fisik wisata Hutan pinus Mangunan

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. oleh karena itu sektor pariwisata harus dirawat dan dijaga keberadaannya. Objek wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan yang ada terkait dengan pengelolaan obyek wisata berbasis masyarakat di Hutan pinus Desa Mangunan Kecamatan Dlingo, maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Menurut pernyataan informan, hutan pinus Mangunan mulai dikembangkan pada akhir tahun 2015, tetapi mulai direalisasikan pada tahun 2016 dan pada Februari 2017 mulai ditetapkan peraturan daerah

untuk tarif masuk hutan pinus Mangunan. Berikut pernyataan dari Bapak

Totok Prasetyo, S.Pd selaku Sekretaris koperasi Noto Wono:

“wisata hutan pinus mangunan ini dikembangkan pada akhir tahun 2015, tetapi mulai direalisasikan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 ini, tetapi untuk peraturan tarif masuk kawasan hutan pinusnya baru februari tahun 2017 kemarin dik”

Tarif tiket masuk wisata hutan pinus mangunan berdasarkan pernyataan Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono yaitu:

“untuk tiket masuk per orang mulai februari 2017 adalah Rp 12.000,- per orang, dan untuk parkir digunakan tarif parkir motor Rp 2000,-, parkir mobil Rp 5000, parkir bus Rp 20.000,-”

Informan menjelaskan bahwa Hutan pinus awalnya bukan termasuk kawasan wisata tetapi karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke hutan pinus menjadikan hutan pinus ini salah satu wisata. Berikut pernyataannya Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“dulu awalnya ini bukan termasuk wisata, tetapi karena banyaknya pengunjung yang masuk dan berfoto di hutan pinus ini, maka hutan pinus ini dijadikan salah satu dari paket wisata”

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Bapak Totok Prasetyo, S.Pd Selaku Sekretaris koperasi Noto Wono yaitu:

“Hutan Pinus Mangunan adalah bagian dari hutan di kawasan RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Mangunan yang ditumbuhi tanaman *Pinus merkusii*. Lokasinya yang bisa ditempuh searah dengan situs makam Raja-Raja Imogiri membuat banyak orang salah menyebutnya menjadi Hutan Pinus Imogiri, terutama wisatawan yang berasal dari luar Jogja. Padahal secara administratif hutan pinus ini tidak termasuk kawasan Imogiri.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono yaitu:

“Sebelum menjadi salah satu destinasi wisata, hutan di kawasan Mangunan adalah sebuah tanah tandus yang kemudian direboisasi. Tak hanya pinus, jenis pohon lain seperti mahoni, akasia, kemiri dan kayu putih juga ditanam di lahan yang luasnya kurang lebih 500 Ha ini. Kini kawasan Mangunan, terutama bagian yang ditanami pohon pinus tak hanya berfungsi sebagai hutan lindung namun juga dikelola sebagai salah satu tujuan wisata”

Hasil wawancara peneliti dengan informan, pelayanan warga sekitar Hutan Pinus Mangunan sangat memuaskan, dan kualitas pelayanannya juga memuaskan. Dan biaya yang dikeluarkan relatif murah. Berikut pernyataannya Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“pengunjung Hutan Pinus Mangunan banyak yang puas, pernah saya tanya dengan salah satu pengunjung katanya disini warganya ramah-ramah dan sangat membantu untuk pembuatan foto seperti dokumentasi foto-foto bersama keluarga, harga yang dikeluarkan sangat murah dibanding dengan obyek wisata lain”

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono:

“Banyak pengunjung terkesan dengan keindahan alam, cuaca yang baik, keramahan dan kebaikan kebudayaan yang ada pada masyarakat di Hutan Pinus Mangunan”

2. Fasilitas Wisata Hutan Pinus Mangunan

Berdasarkan wawancara dengan pengelola menjelaskan fasilitas wisata di hutan pinus mangunan adalah banyaknya fasilitas yang ada seperti gardu pandang, panggung pertunjukan, kamar mandi umum,

mushola dan warung-warung sederhana. Berikut pernyataannya Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“Berbagai fasilitas wisata seperti gardu pandang, panggung pertunjukan yang menyatu dengan alam, kamar mandi umum, mushola dan warung-warung sederhana pun telah di bangun di kawasan wisata ini. Tak hanya suasana hutan nan asri yang menarik perhatian banyak wisatawan, keberadaan sumber mata air Bengkung yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai lokasi pertapaan Sultan Agung Hanyakrakusuma pun menarik para peziarah untuk datang berkunjung. Untuk menemukan situs mata air yang kemudian dibangun pemerintah Belanda pada tahun 1925 hingga 1930 ini ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, bisa dengan *trekking* dari tempat parkir menembus hutan yang rapat mengikuti jalur *outbond* Watu Abang atau jalan melingkar yang lebih jauh namun bisa ditempuh dengan sepeda atau sepeda motor”

Sarana prasarana merupakan suatu fasilitas yang dapat menonjolkan potensi dari obyek daya tarik wisata (menambah daya tarik obyek utama) dan melengkapi kekurangannya. Pengembangan sarana prasarana penunjang merupakan salah satu hal yang penting yang dapat memberikan kepuasan bagi pengunjung. Sarana prasarana penunjang harus disesuaikan berdasarkan selera penunjang yang semakin kompleks sehingga mampu memenuhi harapan penunjang. Pembangunan sarana prasarana harus tetap mengutamakan kealamian dan kelestarian lingkungan serta dibangun dengan kokoh di lokasi yang tepat.

Pernyataan salah satu narasumber tentang pendapatan retribusi hutan pinus mangunan. Berikut pernyataannya:

“pendapatan retribusi disini dikelola oleh pemerintah dek, perolehan retribusi dikawasan hutan pinus Mangunan disetor ke pemerintah Kabupaten Bantul”

Narasumber menjelaskan pendapatan retribusi digunakan untuk masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Berikut pernyataannya:

“pendapatan retribusi dikawasan hutan pinus Mangunan ini digunakan guna menambah pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul, berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah, untuk pembangunan dan pendapatan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat Kabupaten Bantul”

Sarana prasarana penunjang wisata harus diberi pemeliharaan secara berkala sehingga ketahanan bangunan lebih lama serta dapat meminimalkan penggunaan negatif yang ditimbulkan. Pembangunan fasilitas penginapan ditiadakan karena masyarakat memandang akan terjadi dampak negatif meskipun pengunjung berkeinginan menambah fasilitas tersebut. Salah satu alternatif adalah rumah masyarakat dijadikan sebagai tempat menginap (*homestay*) dengan memberikan keramahan dan pelayanan pengunjung. Alternatif lainnya adalah pengunjung menginap di hotel/penginapan yang terdekat dengan obyek wisata.

3. Aksebilitas Hutan Pinus Mangunan

Aksebilitas adalah kemudahan pengunjung untuk mengakses daerah tujuan wisata merupakan hal yang sangat penting, baik dari kondisi jalan yang baik serta kemudahan sarana transportasi dari tempat pemberhentian menuju daerah tujuan wisata alam. Tetapi di wisata hutan pinus aksesnya menuju kawasan wisata masih terbatas kondisi jalan menuju seluruh wisata sebagian dalam kondisi rusak dan berlubang

(sepanjang ± 1 km), karena rata-rata digunakan sebagai jalur bagi truk pengangkut pasir. Berikut pernyataannya Bapak Totok Prasetyo, S.Pd Selaku Sekretaris koperasi Noto Wono:

“akses kondisi jalan menuju wisata hutan pinus dalam sebagian kondisi rusak dan berlubang (sepanjang ± 1 km), karena rata-rata digunakan sebagai jalur bagi truk pengangkut pasir”

Pernyataan tersebut didukung oleh narasumber bahwa untuk jalan yang berlubang sudah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah berupa pengaspalan jalan. Berikut pernyataannya Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono:

“iya.. benar, tetapi sudah ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah berupa pengaspalan jalan, namun masih tertunda dan belum maksimal. Lokasi obyek wisata alam jauh dari pusat kota yaitu di daerah terpencil. sehingga untuk mengakses hutan pinus tersebut harus menggunakan kendaraan pribadi atau sewa karena sarana transportasi umum jarang dan bahkan tidak ada”

Berikut pernyataan narasumber Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“Hutan pinus Mangunan, kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi berada sekitar 30 km arah selatan dari kota Yogyakarta yang bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi atau sewa mobil di Jogja. Pilihan transportasi kendaraan pribadi atau rental mobil di Jogja sangat dianjurkan untuk mencapai objek wisata ini mengingat belum tersedianya angkutan umum menuju lokasi”

Kemudahan pengunjung untuk mengakses daerah tujuan wisata merupakan hal yang sangat penting, baik dari kondisi jalan yang baik serta kemudahan sarana transportasi dari tempat pemberhentian (terminal,

stasiun kereta api dan lainnya) menuju daerah tujuan wisata alam. Kondisi jalan menuju seluruh obyek wisata dalam kondisi rusak dan berlubang (sepanjang ± 1 km), karena rata-rata digunakan sebagai jalur bagi truk pengangkut pasir khususnya di hutan pinus mangunan. Sudah ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah berupa pengaspalan jalan, namun masih tertunda dan belum maksimal. Lokasi obyek wisata alam jauh dari pusat kota yaitu di daerah terpencil. Sehingga untuk mengakses daerah tersebut harus menggunakan kendaraan pribadi atau sewa karena sarana transportasi umum jarang dan bahkan tidak ada.

4. Peranan masyarakat dalam mempromosikan wisata hutan pinus mangunan

Masyarakat sekitar dalam mempromosikan Hutan Pinus Mangunan melalui penyebaran brosur, leaflet. Berikut pernyataan narasumber Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“masyarakat disini kami ajak musyawarah dalam mempromosikan hutan Pinus Mangunan ini, banyak yang melakukan penyebaran brosur, leaflet, dari mulut ke mulut, juga banyak yang mengiklankan lewat facebook, twitter, instagram. Mereka mempromosikan juga untuk menaikkan pendapatan mereka juga mas”

Kegiatan promosi merupakan kunci dalam mendorong kegiatan Agrowisata. Informasi dan pesan promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui leaflet, booklet, pameran, cinderamata, mass media (dalam bentuk iklan atau media audiovisual), serta penyediaan informasi pada tempat public (hotel, restoran, bandara dan lainnya). Dalam kaitan ini kerjasama antara objek Agrowisata dengan

Biro Perjalanan, Perhotelan, dan Jasa Angkutan sangat berperan. Salah satu metode promosi yang dinilai efektif dalam mempromosikan objek Agrowisata adalah metode "*tasting*", yaitu memberi kesempatan kepada calon konsumen/wisatawan untuk datang dan menentukan pilihan konsumsi dan menikmati produk tanpa pengawasan berlebihan sehingga wisatawan merasa betah. Kesan yang dialami promosi ini akan menciptakan promosi tahap kedua dan berantai dengan sendirinya.

Berikut pernyataan narasumber Bapak Totok Prasetyo, S.Pd selaku Sekretaris koperasi Noto Wono tentang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan wisata hutan pinus:

“dalam pengelolaan hutan pinus mangunan ini, masyarakat diikutsertakan dalam pengembangannya, seperti masyarakat membuat tulisan-tulisan untuk jadi obyek foto wisatawan, masyarakat juga dapat keuntungannya dik”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh jawaban bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata hutan pinus Mangunan, peranan masyarakat sangat diperlukan dalam ikut berpartisipasi. Mulai dari segi keikutsertaannya memberikan dukungan, ide/pendapat, bahkan sampai pada pemberian tenaga. Akan mampu menunjang optimalnya pengelolaan wisata hutan pinus mangunan. Sebagaimana wawancara yang di lakukan penulis dengan anggota kelompok pokdarwis hutan pinus yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat senang ketika usulan ide/gagasan mereka diterima dengan pengelola agar memperbolehkan masyarakat sebagai objek wisata sehingga bisa membantu perekonomian mereka. Setelah pemilik hutan pinus mangunan mengelola pantai tersebut tiba-tiba masyarakat tidak mau lagi ikut berpartisipasi

dalam pengelolaan hutan pinus mangunan. Dikarenakan tidak sesuai antara tujuan dengan harapan mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diperoleh jawaban bahwa proses partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan pinus adalah tidak luput dari yang namanya keterlibatan masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata alam hutan pinus mangunan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“Konsep pengembangan kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan berbasis masyarakat membuat masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung pada usaha pariwisata Hutan Pinus Mangunan ini seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang ada dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah”

Konsep pengembangan kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan berbasis masyarakat (*Community Based On Tourism*) adalah Konsep Pariwisata berbasis masyarakat, yang nantinya masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung pada usaha pariwisata dengan terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha yang ada. Pada nantinya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Pendapat diperjelas oleh Bapak Totok Prasetyo, S.Pd Selaku Sekretaris koperasi Noto Wono:

“Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan memberikan beberapa manfaat, seperti 1. Peningkatan pendapatan masyarakat, 2. Menjaga kelestarian sumberdaya hutan Pinus, 3. Menjaga integritas kultural masyarakat”

Untuk itu pengelolaan berbasis masyarakat (*community base management*) sangat penting dipertahankan dan disesuaikan dengan pendekatan konsep manajemen (kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* terkait lainnya).

Pengembangan kawasan wisata Hutan Pinus adalah satu bentuk pengelolaan kawasan wisata yang berupaya untuk memberikan manfaat terutama bagi upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan potensi dan jasa lingkungan sumber daya.

Pemanfaatan secara optimal terhadap potensi kehutanan, tidak berarti melupakan faktor yang sangat penting bagi nilai pengembangan kawasan wisata hutan Pinus yang berkelanjutan, yaitu upaya perbaikan terhadap kawasan yang rusak dan keanekaragaman potensinya telah berkurang.

Tahun 2002 adalah tahun dimana dicanangkannya Tahun Ekowisata dan Pegunungan di Indonesia. Dari berbagai workshop dan diskusi yang diselenggarakan pada tahun tersebut di berbagai daerah di Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dirumuskan 5 (lima) Prinsip dasar pengembangan ekowisata di Indonesia yaitu (Zalukhu : 2009) :

a. Pelestarian

Prinsip kelestarian pada ekowisata adalah kegiatan ekowisata yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan budaya setempat. Salah satu cara menerapkan prinsip

ini adalah dengan cara menggunakan sumber daya local yang hemat energi dan dikelola oleh masyarakat sekitar. Tak hanya masyarakat, tapi wisatawan juga harus menghormati dan turut serta dalam pelestarian alam dan budaya pada daerah yang dikunjunginya.

b. Pendidikan

Kegiatan pariwisata yang dilakukan sebaiknya memberikan unsur pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan memberikan informasi menarik seperti nama dan manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar daerah wisata, dedaunan yang dipergunakan untuk obat atau dalam kehidupan sehari-hari, atau kepercayaan dan adat istiadat masyarakat lokal. Kegiatan pendidikan bagi wisatawan ini akan mendorong upaya pelestarian alam maupun budaya. Kegiatan ini dapat didukung oleh alat bantu seperti brosur, buklet atau papan informasi.

c. Pariwisata

Pariwisata adalah aktivitas yang mengandung unsur kesenangan dengan berbagai motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. Ekowisata juga harus mengandung unsur ini. Oleh karena itu, produk dan jasa pariwisata yang ada di daerah kita juga harus memberikan unsur kesenangan agar layak jual dan diterima oleh pasar.

d. Perekonomian

Ekowisata juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terlebih lagi apabila perjalanan wisata yang dilakukan menggunakan

sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu. Ekowisata yang dijalankan harus memberikan pendapatan dan keuntungan bagi penduduk sekitar sehingga dapat terus berkelanjutan.

e. Partisipasi masyarakat setempat

Partisipasi masyarakat akan timbul, ketika alam/budaya itu memberikan manfaat langsung/tidak langsung bagi masyarakat. Agar bisa memberikan manfaat maka alam/ budaya itu harus dikelola dan dijaga. Begitulah hubungan timbal balik antara atraksi wisata-pengelolaan manfaat yang diperoleh dari ekowisata dan partisipasi.

Produk wisata diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan kegiatan promosi yang baik dan terencana sehingga obyek daya tarik wisata hutan pinus mangunan dapat dikenal dan diminati. Promosi yang dilakukan melalui media cetak/elektronik, pembuatan leaflet, booklet, panduan wisata alam dan papan interpretasi besar berupa peta pariwisata hutan pinus mangunan, pemantapan pasar wisata, pemantapan Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata, penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dan even pariwisata serta bekerjasama dengan investor, agen wisata dan angkutan umum (bus, kereta wisata dll) dalam pengembangan wisata.

Berkaitan dengan informasi yang didapatkan pengunjung mengenai obyek wisata alam adalah dari mulut ke mulut, maka promosi dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan maksimal kepada pengunjung. Pelayanan yang memuaskan dapat memberikan

kesan mendalam mengenai obyek wisata yang dikunjungi. Dengan demikian pengunjung akan datang kembali serta memberikan informasi kepada orang yang dikenalnya untuk mengunjungi tempat wisata tersebut.

B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan pinus Mangunan Berbasis Masyarakat

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan obyek wisata berbasis masyarakat yaitu faktor pendukung pengelolaan hutan pinus Mangunan dan faktor penghambat dalam pengelolaan hutan pinus Mangunan. Berikut analisis pembahasannya:

1. Faktor Pendukung pengelolaan hutan pinus Mangunan Berbasis Masyarakat

a. Manajemen Pengelolaan Obyek wisata Hutan Pinus Mangunan

1) Perencanaan

Pembangunan maupun pengembangan, merupakan suatu proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan tertentu yang dianggap kurang dikehendaki menuju ke suatu keadaan tertentu yang dinilai lebih dikehendaki. Manakala pemahaman tersebut diaplikasikan pada sektor kepariwisataan, maka dapat dikonstruksikan bahwa pembangunan ataupun pengembangan pariwisata merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik,

yang diarahkan menuju pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. dalam rangka pengembangan pariwisata, maka diperlukan strategi pengembangan atau pengelolaan pariwisata untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini beberapa strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengelolaan pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengelolaan pariwisata merencanakan Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, tentang pengembangan pariwisata memerlukan kebijakan perencanaan yang sistematis. Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya tidak menguntungkan semua pihak. Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengelolaan pariwisata merencanakan Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah untuk Kabupaten Bantul direncanakan tahun 2017 akan diperdakan.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah untuk Kabupaten Bantul direncanakan tahun 2017 akan diperdakan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pariwisata yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman pengembangan pariwisata bagi pemerintah daerah,

masyarakat, maupun dunia usaha. Agar memberikan legitimasi yuridis yang memadai, maka sebagai kebijakan pariwisata perlu dituangkan dalam suatu peraturan daerah. Berikut pernyataan narasumber:

“Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pariwisata yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman pengembangan pariwisata bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha”.

2) Sumber Daya Manusia

Berikut pernyataan narasumber Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“strategi yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Bantul, ada beberapa program kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan seperti, Kursus Bahasa Inggris yang diikuti oleh masyarakat, sementara keterlibatan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul diikuti oleh 2 orang pegawai. Sementara kemampuan pegawai yang lain dirasa sudah cukup sebab menguasai beberapa bahasa asing, sesuai dengan latar belakang sarjana sastra yang disandang. Selain kursus bahasa inggris”

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata juga dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Wisata. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakannya. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Bantul harus lebih ditingkatkan. Banyaknya objek dan daya tarik wisata yang

sampai saat ini masih belum dikelola dengan baik membutuhkan sumber daya yang berkompeten.

Faktor sumber daya manusia pariwisata sangat menentukan eksistensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, sikap dan kemampuan staff akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan, kepuasan dan kesan atas kegiatan wisata yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dalam pengertian ini adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan.

Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Bantul ada beberapa program kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan seperti, Kursus Bahasa Inggris yang diikuti oleh masyarakat, sementara keterlibatan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul diikuti oleh 2 orang pegawai. Sementara kemampuan pegawai yang lain dirasa sudah cukup sebab menguasai beberapa bahasa asing, sesuai dengan latar belakang sarjana sastra yang disandang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata juga dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Wisata. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakannya. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Bantul harus lebih ditingkatkan. Banyaknya objek dan daya tarik wisata yang sampai saat ini masih belum dikelola dengan baik membutuhkan sumber daya yang berkompeten.

Faktor sumber daya manusia pariwisata sangat menentukan eksistensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, sikap dan kemampuan staff akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan, kepuasan dan kesan atas kegiatan wisata yang dilakukan.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan, tentunya lebih menguasai dan memahami tentang potensi daerahnya, sehingga dalam menentukan obyek wisata yang perlu dikembangkan akan lebih tepat. Terkait dengan hal ini sesungguhnya tidak sedikit pemerintah daerah di Indonesia (baik Provinsi, maupun Kota/Kabupaten) sudah mengupayakan meningkatkan peran pariwisata (Martaleni 2011). Menurut Damanik dan Weber (2006),

pelaku yang penting dalam penentuan otoritas pengaturan, penyediaan dan peruntukan.

3) Pendanaan

Dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah, maka perlu dukungan dana baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Selama ini, sumber dana pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut pernyataan yang disampaikan dari narasumber:

“kalo dana pengembangan pariwisata hutan pinus Mangunan ini masih dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Bantul mas”

Tetapi dana masih menjadi hambatan karena belum memadai tentang anggaran untuk pengembangan wisata hutan pinus. Pernyataan disampaikan oleh narasumber Bapak Totok Prasetyo, S.Pd Selaku Sekretaris koperasi Noto Wono. Berikut pernyataanya”

“Penyiapan Program/kegiatan sesuai ketersediaan Anggaran, Pengembangan pariwisata pada daerah wisata hutan pinus memerlukan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran aktifitas pariwisata pada wisata hutan pinus ini”

Namun pada pelaksanaanya masih menemui hambatan, berikut pernyataanya Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono:

Namun di wisata hutan pinus ini masih menemui hambatan dimana alokasi anggaran yang tersedia untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan berupa belanja barang dan jasa, sementara

belanja yang ditujukan untuk pembangunan sarana/prasarana pariwisata menjadi kurang proposional. Ketersediaan dana dalam pengembangan pariwisata memang merupakan hal yang harus diperhitungkan. Penyediaan dana merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sarana prasarana pariwisata. Namun perlu di pahami juga bahwa penggunaan dana dalam pengembangan pariwisata hendaknya disesuaikan dengan program pembangunan yang ada. Penyusunan program maupun kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, merupakan suatu langkah penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pelaku wisata alam adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang bergerak dibidang wisata. Menurut Damanik dan Weber (2006), pelaku yang penting dalam penentuan otoritas pengaturan, penyediaan dan peruntukan infrastruktur terkait kebutuhan pariwisata, tujuan perjalan wisata serta kebijakan terkait wisata adalah pemerintah dan stakeholder terkait. Pemerintah belum serius dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata. Kerjasama bersama masyarakat dan investor belum terealisasi sehingga belum ada kesepahaman antara seluruh pihak dan menyebabkan pelayanan keamanan, kenyamanan dan kepuasan pengunjung belum terpenuhi.

4) Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengkaji terhadap program pembangunan dengan focus perhatian terhadap hasil dan dampaknya. Berkenaan dengan dampak social, maka program pembangunan akan dikaji lebih pada sejauh mana pembangunan kawasan hutan pinus Mangunan tersebut mendatangkan manfaat bagi sasaran pembangunan

tersebut, serta dampak yang ditimbulkan, baik secara positif maupun negatif. Berikut pernyataan narasumber:

“Pelaksanaan evaluasi antara lain melibatkan para pimpinan sebagaimana dalam kegiatan pemantauan. Pelaksanaan evaluasi terhadap pembangunan hutan pinus Mangunan sebagai kawasan wisata yang berkenaan dengan eksistensi dan kelestarian lingkungan sosialnya haruslah mengkaji dan bahkan mengukur hasilnya pada tingkat pemahaman dan perasaan masyarakat sasaran”

Dengan demikian, kajian-kajian yang bersifat kualitatif yang berupaya memahami persepsi dan perasaan masyarakat menjadi penting. Dan dalam hal keserasian lingkungan sosial adalah suatu hal yang masyarakat setempat paling mengetahuinya.

5) Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaannya dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Di lain pihak, pemantauan dimaksudkan juga untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal guna menghadapi tantangan pembangunan yang menguntungkan.

Berikut pernyataan narasumber:

“Dalam pembangunan wisata hutan pinus Mangunan, pengawasan dilakukan sejak tahap prakonstruksi, konstruksi dan pasca pembangunan”

Narasumber menjelaskan dalam pengawasan melibatkan pemimpin dalam pengawasan. Berikut pernyataannya:

“Pengawasan tersebut melibatkan pemimpin yang setidaknya terdiri dari: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai pengelola operasional yang lebih mengetahui secara komprehensif model-model strategis pembangunan tersebut; 2. Pihak

swasta/investor yang berpotensi sebagai sumber/sumber informasi yang efektif dan efisien dalam alokasi investasi di sektor-sektor strategis serta sebagai pelaksana pembangunan daerah; 3. Masyarakat sebagai sasaran dan pemanfaat pembangunan yang dituntut untuk berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada bagi peningkatan kesejahteraan serta mampu menilai secara obyektif kinerja pembangunan; 4. Perguruan tinggi sebagai lembaga akademik yang mengkaji berbagai proses pembangunan secara ilmiah serta mampu menemukan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang bersangkutan, berituti solusi pemecahannya; 5. Lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pengawasan yang efektif”

b. Daya tarik wisata dan integrasi obyek wisata

Berdasarkan wawancara dengan narasumber menjelaskan tentang keindahan wisata hutan pinus yang menjelaskan pemandangan pohon pinus yang menjulang tinggi dan bisa membantu melepaskan penat. Berikut pernyataannya Bapak Totok Prasetyo, S.Pd selaku Sekretaris koperasi Noto Wono:

“wisatawan yang saya lihat sangat menikmati pemandangan pohon pinus yang menjulang tinggi, dan kebanyakan kata mereka membantu melepaskan penat dan pikiran menjadi segar”

Menurut narasumber banyak wisatawan yang hanya sekedar berjalan-jalan menikmati indahnya pohon pinus, banyak juga seperti anak-anak muda yang berfoto dibawah batang pohon pinus, bermain ayunan dengan pose-pose manja. Berikut pernyataannya Bapak Paryanto selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Won:

“Wisatawan yang masuk ke kawasan hutan yang sebagian besar tertutup daun pinus kering, banyak segerombolan anak muda yang mulai asyik berpose dan mengabadikan gaya menggunakan kamera, beratraksi di atas batang-batang pinus yang telah disediakan bangku-bangu sederhana atau duduk di ayunan dengan pose manja, lucu-lucu gayanya dik”

Menurut Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto

Wono juga mengatakan:

“wisata hutan pinus ini menjadi daya tarik bagi para pecinta fotografi, suasana hutan pinus yang selalu disebut-sebut seperti hutan di Forks atau kota-kota kecil lain di Evergreen State dalam sebuah film jebolan Hollywood menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta fotografi dan penggemar *selfie*, hutan pinus ini sering didatangi untuk keperluan fotografi termasuk *pre-wedding*. Bahkan pokdarwis setempat sengaja membangun spot khusus saking seringnya tempat ini digunakan untuk *pre-wedding*. Selain view deretan pohon pinus yang mempercantik *background* foto, ada filosofi menarik tentang pohon pinus sebagai lambang cinta orang Korea. Menurut mereka, pohon pinus yang berbatang tegak lurus adalah simbol cinta yang lurus dan tidak bercabang-cabang. Sedangkan daun pinus yang selalu hijau diibaratkan sebagai cinta yang tak pernah berakhir, *Everlasting love*“

Dan menurut narasumber, kebanyakan wisatawan mendapati suasana tenang yang bisa menghilangkan beban pikiran. Berikut pernyataannya Bapak Totok Prasetyo, S.Pd Selaku Sekretaris koperasi Noto Wono:

“saya pernah tanya salah satu pengunjung, katanya mendengar gemeresik gesekan daun dan ranting pohon pinus menjadi simfoni alam yang mampu membuat suasana tenang di Hutan Pinus Mangunan ini dan katanya mampu menghilangkan semua beban serta kerumitan yang memenuhi pikiran mereka”

Wawancara dengan narasumber Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono tentang fasilitas hutan pinus. Berikut pernyataannya:

“dahulu waktu awal-awal wisata hutan pinus ini belum ada pedagang atau aktivitas masyarakat sekitar, jadi pengunjung bawa makanan bekal sendiri, tetapi saat ini sudah berdiri warung-warung makanan kecil dan juga area parkir didepan spot hutan”

c. Promosi dan pemasaran

Upaya-upaya pengenalan dan pemasaran objek dan daya tarik wisata daerah-daerah di Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Promosi dan pemasaran pariwisata merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu destinasi wisata. Promosi dan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul selama ini dilakukan melalui kegiatan Pameran baik di dalam maupun luar daerah dalam rangka memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Selanjutnya kegiatan promosi juga dilakukan melalui media elektronik yang bisa di akses dengan jaringan internet seperti website, baik website yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, maupun website yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berikut pernyataannya Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“kegiatan promosi dan pemasaran di wisata hutan pinus ini dilakukan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul seperti kegiatan pameran baik dalam atau luar daerah, promosi melalui elektronik seperti website”

Pernyataan narasumber diperjelas oleh Bapak Totok Prasetyo, S.Pd Selaku Sekretaris koperasi Noto Wono yang menyatakan bahwa:

“Pengembangan promosi dan pemasaran obyek wisata alam melalui media elektronik (internet, radio dan TV) dan media cetak selebaran, peta wisata, serta iklan di koran dan majalah), secara

periodik diadakan pembaharuan sesuai dengan paket wisata yang dikembangkan seperti 1) Penawaran paket-paket wisata yang menarik, penyediaan sarana transportasi, dan penginapan/*homestay* yang dapat dipesan secara *online* melalui *website* resmi dari pengelola wisata. 2) Membuat *leaflet*, *booklet*, selebaran dan peta wisata kabupaten Tasikmalaya. 3) Mengikuti dan membuat even-even pariwisata yang mengenalkan obyek wisata alam dan budaya lokal daerah melalui pameran, lokakarya dan lainnya”

Dengan diadakannya kegiatan promosi pariwisata, maka salah satu dampak yang paling dirasakan dengan adanya kegiatan promosi pariwisata adalah bertambahnya jumlah kunjungan wisata ke suatu destinasi wisata. Begitu juga dengan kunjungan wisata yang terjadi di Kabupaten Bantul. Aktivitas promosi kepariwisataan secara prinsip merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata (destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak atau pasar wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan produk wisatanya dalam bentuk objek dan daya tarik wisata. Berikut pernyataan informan Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono:

“ehm... dampak promosi yang dirasakan ya tambahnya jumlah kunjungan wisata pohon pinus ini dek, setelah adanya promosi kayak wisata pinus masuk ke tv trans 7 kemarin jadi banyak sekali ini yang mengunjungi wisata pohon pinus”

Dalam kerangka pemahaman pemasaran pariwisata, pada dasarnya keseluruhan produk wisata yang dikembangkan hendaknya dilihat dalam kaitannya dengan keinginan dan harapan wisatawan. Sebagai pembeli, wisatawan harus dapat memahami keseluruhan produk wisata yang ada di destinasi. Orientasi pemasaran pariwisata

pada intinya adalah upaya untuk melihat keluar terhadap kebutuhan pasar wisatawan dan berbagai dampak dari adanya perubahan lingkungan terhadap destinasi.

Kegiatan promosi pariwisata merupakan usaha untuk memperkenalkan produk pariwisata, yakni segala sesuatu yang ditawarkan baik objek dan daya tarik wisata. Kesenambungan kegiatan promosi akan semakin menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung ke destinasi wisata, menikmati produk pariwisata yang ditawarkan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul antara lain adalah lewat festival, pameran di dalam dan luar daerah, website dan media cetak. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam industri pariwisata banyak memberikan manfaat bagi kegiatan promosi pariwisata. Penyediaan website dalam rangka promosi pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan bagian dari penggunaan teknologi dan informasi yang dimanfaatkan guna pengembangan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mempermudah industri pariwisata maka perlu diikuti dengan pengembangan suatu teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada setiap Destinasi wisata yang terhubung dengan laman website yang ada. Hal ini berguna demi kelancaran promosi wisata. Pemanfaatan TIK dalam industri pariwisata dapat dilakukan melalui E-Tourism. E-Tourism merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada wisatawan dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses.

2. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada suatu destinasi wisata diharapkan agar dapat selalu berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal dapat tercapai. Namun dalam kenyataannya pembangunan pariwisata masih menemui hambatan atau kendala yang dihadapi.

Kabupaten Bantul sesungguhnya memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan pariwisata terutama dari kondisi alam yang memiliki banyak keunikan serta budaya warisan leluhur yang masih terpelihara. Namun demikian, dalam kenyataannya kabupaten ini belum mampu memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatifnya di bidang pariwisata untuk mengangkat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bantul dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, masih terdapat kendala yang dihadapi.

Berikut pernyataan informan Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono:

“Terbatasnya anggaran dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah yang berdampak pada minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada serta pelestarian dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata”

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, diperlukan biaya yang tidak kecil jumlahnya. Perbaikan jembatan, jalan-jalan, pembangunan fasilitas umum seperti bandar udara, pelabuhan maupun terminal untuk kelancaran akses wisatawan mengunjungi objek dan daya tarik wisata yang ditawarkan serta kebutuhan fasilitas umum lainnya untuk kegiatan kepariwisataan memerlukan dukungan dana yang cukup besar.

Berikut pernyataan informan Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“hambatan yang ada di wisata hutan pinus ini adalah lahan parkir yang belum memadai, karena parkir yang kurang luas jadi membuat wisatawan kesusahan untuk parkir, mereka kadang hanya memarkirkan kendaraannya dipinggir-pinggir jalan karena akses lahan parkir yang sempit”

Pernyataan diperjelas oleh informan yang pada waktu hujan membuat jalan licin jadi susah untuk parkir. Berikut pernyataannya Bapak Totok Prasetyo, S.Pd Selaku Sekretaris koperasi Noto Wono:

“ Pada saat musim hujan yang sering menjadi masalah, karean areal parkir serta jalan yang ada akan menjadi becek dan licin”

Berikut pernyataan subyek Bapak Paryanto Selaku Seksi Keindahan Lingkungan koperasi Noto Wono:

“Hambatan yang kedua adalah tersedianya air bersih, Air bersih yang ada di wisata hutan pinus mangunan belum cukup baik,

karena aliran air menuju wisata sangat terbatas, maka dinas pariwisata akan memberikan bantuan dalam penatalaksanaan sistem air di wisata mangunan”

Menurut narasumber pemasangan jaringan air bersih PDAM yang susah mengakibatkan kendala diwisata hutan pinus mangunan. Berikut pernyataan informan Bapak Ismail Selaku Seksi Humas koperasi Noto Wono:

“disini susah air bersih karena pemasangan PDAM susah sampai ke sini, jadi untuk kendala air bersih diwisata ini menjadi masalah juga dik”

a. Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Berbicara tentang pengembangan pariwisata memerlukan kebijakan perencanaan yang sistematis. Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya tidak menguntungkan semua pihak.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah untuk Kabupaten Bantul direncanakan tahun 2017 akan diperadakan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pariwisata yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman pengembangan pariwisata bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha. Agar memberikan legitimasi yuridis yang memadai, maka sebagai kebijakan pariwisata perlu dituangkan dalam suatu peraturan daerah. Namun pada kenyataannya rencana induk pengembangan pariwisata daerah di

Kabupaten Bantul masih dalam draft perencanaan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan sebuah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata yang perlu disediakan oleh suatu daerah dalam rangka mempermudah pengembangan pariwisata, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pengembangan itu sendiri. Dengan dituangkannya rencana induk pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Bantul, maka pengembangan pariwisata daerah ke depan akan lebih terarah.

b. Penyiapan Program/kegiatan sesuai ketersediaan Anggaran

Pengembangan pariwisata pada daerah destinasi wisata memerlukan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran aktifitas pariwisata pada suatu daerah destinasi.

Namun pada pelaksanaannya masih menemui hambatan, dimana alokasi anggaran yang tersedia untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan berupa belanja barang dan jasa, sementara belanja yang ditujukan untuk pembangunan sarana/prasarana pariwisata menjadi kurang proposional. Ketersediaan dana dalam pengembangan pariwisata memang merupakan hal yang harus diperhitungkan. Penyediaan dana merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sarana prasarana pariwisata. Namun perlu dipahami juga bahwa penggunaan dana dalam pengembangan pariwisata

hendaknya disesuaikan dengan program pembangunan yang ada. Penyusunan program maupun kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, merupakan suatu langkah penggunaan dana yang efektif dan efisien.